

BAB I

PENDAHULUAN

Association of South East Asian Nation (ASEAN) merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang hingga saat ini terdiri dari sepuluh (10) negara, yaitu; Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina, Singapura, Laos, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam. Pada tahun 1997, disepakati *ASEAN Vision 2020*, yaitu mewujudkan kawasan yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi.

A. Latar Belakang

ASEAN Economic Community (AEC) merupakan salah satu bentuk *Free Trade Area (FTA)* yaitu suatu kerja sama ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara yang terintegrasi dengan harapan mampu memberikan akses yang lebih mudah pada perdagangan luar negeri. Negara-negara di *ASEAN* yang dikenal sebagai komoditi ekspor berbasis sumber daya alam terbesar di Asia juga menjadikan peluang dalam persaingan pasar produksi. Namun, jika pemerintah tidak melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut, beberapa sektor industri akan mengalami titik kelemahan ketika *FTA* benar-benar diimplementasikan.

Awal mula dibentuknya AEC pada pembentukan AFTA (Asean Free Trade Area) pada tahun 1992 dan pada KTT ASEAN di Phon Pen bulan November 2002 para pemimpin ASEAN menyetujui proses integrasi ekonomi

ASEAN sebagai pembentukan AEC yang diprakarsai oleh CEPT (Common Effective Preferential Tariff).

AEC, disetting sebagai tujuan akhir dari integrasi ekonomi negara-negara ASEAN, seperti yang dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020 :

“to create a stable prosperous and highly competitive ASEAN economic region in which there is a free flow of goods, services, investment, skilled labour and a free flow of capital, equitable economic development and reduced poverty and socio-economic disparities in year 2020”.¹

Selanjutnya pada pertemuan di Cebu, Filipina AEC maju pada tahun 2015 yang kemudian AEC dipilih oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi rakyatnya secara bersama-sama, mengingat cara ini merupakan opsi yang paling efisien dibandingkan bila upaya peningkatan kemakmuran dilakukan secara unilateral.

AEC dalam upaya meningkatkan kemakmuran ekonomi dilakukan melalui penguatan daya saing untuk memenangkan kompetisi global, melalui tahapan integrasi pasar domestik sebagai pasar tunggal dan integrasi basis produksi sehingga pada akhirnya mendorong peningkatan daya saing dalam menembus pasar global. Oleh sebab itu, pencapaian AEC dilakukan melalui empat tahapan strategis, meliputi : pencapaian pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian global. (Piagam ASEAN, November 2007)²

¹ .Berkas.dpr.go.id/ Info Singkat Vol. VI, no.10/II/P3DI/Mei/2014

² .Sjamsul,Arifin: Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA) Memperkuat Sinergi ASEAN ditengah Kompetisi Global,Kompas-Gramedia (2008),Jakarta,hal 5

Adapun tantangan AEC seperti di sektor lapangan tenaga kerja yang ada di Indonesia yaitu menaikkan angka pengangguran, karena masih banyaknya tenaga kerja Indonesia yang belum terlatih dan sempurna untuk berkompetisi dengan tenaga kerja asing yang kemampuannya lebih baik seperti buruh-buruh yang didatangkan dari China, yang mempunyai sertifikat pendidikan yang tinggi. Bila Indonesia tidak siap, maka aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan modal, terlihat sebagai ancaman.

Permasalahan lain yang lebih kompleks dan melebihi sebuah ancaman yang bisa membunuh rakyat Indonesia yaitu ketidakstabilan sistem perekonomian Indonesia menciptakan penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Terutama bagi mereka yang tergolong dalam kaum menengah kebawah. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia menambah permasalahan utama yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam mencapai tujuan AEC. Sumber daya manusia Indonesia pada saat ini belum bisa dikatakan maju karena masih banyak kekurangan dan lemahnya kemampuan SDM Indonesia dalam menghadapi free trade area ASEAN 2015. Kasus yang terjadi faktanya sekarang saja banyak sekali produk-produk luar negeri yang membanjiri pasar Indonesia dari elektronik hingga produk-produk fashion dan lainnya, kasus seperti ini bisa membuktikan bahwa kualitas SDM Indonesia belum begitu mampu bersaing dengan kreatifitas Negara lain.

Di era abad 21 merupakan era dimana persaingan bisnis melalui Free Trade Area (FTA) semakin ketat dengan begitu kesiapan pemerintah dalam menghadapi era tersebut membutuhkan dukungan dari para pelaku bisnis dan

akademisi. Strategi SDM perlu disiapkan secara khusus oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan agar menghasilkan SDM yang mampu bersaing ditingkat internasional khususnya ditingkat ASEAN dimana pada tahun 2015 akan segera terselenggarakan yang di tandai dengan para pemimpin negara ASEAN pada tahun 1992 memutuskan didirikannya AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang bertujuan meningkatkan keunggulan bersaing regional karena produksi diarahkan pada orientasi pasar dunia melalui eliminasi tarif/bea maupun menghilangkan hambatan tarif. Enam negara telah menanda tangani persetujuan CEPT (The Common Effective Preferential Tariff) yang pada dasarnya menyetujui penghapusan bea impor setidaknya 60 persen dari IL (inclusion list) pada tahun 2003.

Pada tahun 2000, terdapat sekitar 53.294 produk dalam IL yang merupakan kurang lebih 83 dari semua produk ASEAN. Globalisasi ekonomi dan sistem pasar bebas dunia menempatkan Indonesia bagian dari sistem tersebut.³ Adanya pasar bebas atau FTA tersebut membuka kesempatan dan persaingan pada pasar barang dan jasa, pasar investasi, pasar modal dan pasar tenaga kerja. Dalam hal ini Indonesia merupakan salah satu negara populasinya terbesar di kawasan ASEAN, yang mana masyarakatnya *Heterogen* dengan berbagai jenis suku, bahasa dan adat istiadat dan dilimpahi banyak sumber daya alam yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup bagus, pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia setelah India. Ini akan

³ Djoko Hanantijo (dosen PNS dptk Universitas Surakarta), Jurnal STRATEGI SDM DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL, Surakarta

menjadi modal yang penting untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menuju *ASEAN Economic Community (AEC)* tahun 2015.

Namun, kesiapan SDM Indonesia untuk menghadapi AFTA 2015 belum bisa dikatakan siap bisa juga dibuktikan bahwa kesiapan belum matang dari segi sumber daya manusia bisa dilihat dari data catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas angka pengangguran sarjana di Indonesia lebih dari 300.000 orang, struktur pendidikan dan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2 %. Data lain dari BPS Agustus 2013, pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 6,25 persen, dan angkatan kerja di Indonesia saat itu mencapai 118,2 juta orang.⁴ Juga masih ada lebih dari 360 ribu orang sarjana yang menganggur, sangat mencengangkan dan memprihatinkan. Terlebih menjelang diterapkannya AFTA 2015, ledakan pengangguran terdidik akan menjadi kenyataan. Maka dari itu pemerintah seharusnya memikirkan dahulu kondisi sumber daya manusia Indonesia sekarang bukan malah hanya mengambil keputusan dengan mendukung adanya free trade area 2015 ini akan lebih mempersulit masyarakat terdidik yang belum mempunyai pekerjaan di negeri sendiri. Menurut data yang dilansir kementerian perindustrian, hanya 31% industri manufaktur yang mempunyai kemampuan daya saing di pasar ASEAN, sisanya 69% industri lainnya masih sangat kesusahan bertarung dipasar bebas ini. Selain itu menurut Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur

⁴ http://www.duniaesai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108:sdm-indonesia-dalam-persaingan-global&catid=37:ekonomi&Itemid=93

Kementrian Perindustrian, Harjanto bahwa, hanya 1.250 pas tarif atau 31,26% dari total 3,998 pas tarif produk industri manufaktur yang siap bertarung di AEC.⁵

Dalam kerangka ASEAN daya saing ekonomi Indonesia masih berada di peringkat tengah pada kawasan ASEAN dan berada dibawah negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand maupun Brunei. Sementara itu, dari segi kualitas tenaga kerja, dapat dikatakan bahwa kualitas tenaga kerja Indonesia masih berada di peringkat 5 di bawah Thailand. Belum lagi persoalan pindahnya para pekerja *high skilled* ke Negara-negara lain. Dengan adanya ASEAN Community 2015 yang memperbolehkan seseorang dengan bebas berkerja di Negara-negara anggota ASEAN maka akan banyak pula pekerja-pekerja *medium skilled* seperti dari Singapura, Malaysia dan Filipina yang akan masuk ke pasar Indonesia.⁶ Sumber daya manusia merupakan penggerak roda pembangunan, jumlah dan komposisinya terus berubah berkaitan dengan proses demografi. Pada tahun 2000 terdapat sekitar 141,2 juta tenaga kerja yang sekitar 61.50 persen berada di pulau Jawa. Kendati, menurut BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 tenaga kerja mengalami sedikit kenaikan dari 67,22 persen (1999) menjadi 67,75 persen pada tahun 2000 yang mengidentifikasikan sedikit kenaikan mutu SDM, kita masih harus berupaya keras meningkatkan mutu SDM dengan membandingkannya minimal dengan mutu tenaga kerja di Asia Tenggara misalnya dengan Singapura dan Malaysia.⁷

⁵ Harian Bisnis & Investasi KONTAN, Senin 7 Juli 210

⁶<http://habibiecenter.or.id/detilurl/en/277/news/Daya.Saing.SDM.Indonesia.Menghadapi.Era.ASEAN.2015,.APEC.dan.WTO>

⁷ http://bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=1&id_subyek=12

Kesepakatan AEC telah diratifikasi dan tidak mungkin untuk dibatalkan, sehingga yang sangat dibutuhkan saat ini adalah menyiapkan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk menghadapi persaingan perdagangan bebas ASEAN. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia diharapkan memiliki langkah strategis dalam menghadapi persaingan pasar bebas ASEAN (AFTA) agar SDM Indonesia mampu bersaing dengan Negara-negara Asia Tenggara lainnya.

B. Rumusan Masalah

Lerdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

“Strategi apa yang dapat diambil pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia untuk menghadapi AEC 2015 ?”

C. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan bagaimana seharusnya cara pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk menghadapi AEC 2015, penulis akan menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. Konsep Sistem Politik

Sistem adalah kesatuan seperangkat struktur yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem politik adalah kesatuan (kolektivitas) seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan suatu

negara. Pendekatan sistem politik ditujukan untuk memberi penjelasan yang bersifat ilmiah terhadap fenomena politik. Pendekatan sistem politik dimaksudkan juga untuk menggantikan pendekatan klasik ilmu politik yang hanya mengandalkan analisis pada negara dan kekuasaan. Pendekatan sistem politik diinspirasi oleh sistem yang berjalan pada makhluk hidup.⁸

Dalam pendekatan sistem politik, masyarakat adalah konsep induk oleh sebab sistem politik hanya merupakan salah satu dari struktur yang membangun masyarakat seperti sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya, sistem kepercayaan dan lain sebagainya. Sistem politik sendiri merupakan abstraksi (realitas yang diangkat ke alam konsep) seputar pendistribusian nilai di tengah masyarakat.⁹ Easton mengidentifikasi empat atribut yang perlu diperhatikan dalam setiap kajian sistem politik, yang terdiri atas:

1. Unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem politik

Serupa dengan paradigma fungsionalisme, dalam kerangka kerja sistem politik pun terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk menggerakkan roda kerja sistem politik. Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai

⁸https://www.academia.edu/6546138/Review_KERANGKA_KERJA_ANALISA_SISTEM_POLITIK_DAN_VID_EASTON_ALIH_BAHASA_SAHAT_SIMAMORA_STATUS_TEORI_SISTEM-SISTEM_IDENTIFIKASI_SISTEM_POLITIK_DAN_LINGKUNGAN_SISTEM_POLITIK_BAB_III_BAB_IV_DAN_BAB_V_HALAMAN_54_-113

⁹ Michael Saward, *The Wider Canvas: Representation and Democracy in State and Society* dalam Sonia Alonso, John Keane, and Wolfgang Merkel, eds., *The Future of Representative Democracy* (New York: Cambridge University Press, 2011). Hal 75

politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Unit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik, misalnya dalam cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah tugas, dan sejenisnya.

2. Input-output

Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Input yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik dapat berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara sederhana dapat disebut seperangkat kepentingan yang alokasinya belum merata atas sejumlah unit masyarakat dalam sistem politik. Dukungan secara sederhana adalah upaya masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. Output terbagi dua yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan atau dukungan yang masuk. Sementara itu, tindakan adalah implementasi konkrit pemerintah atas keputusan yang dibuat.

3. Diferensiasi dalam sistem

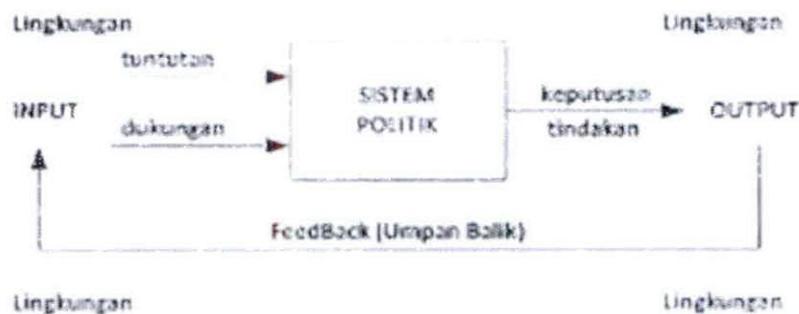
Sistem yang baik harus memiliki diferensiasi (pembedaan dan pemisahan) kerja. Di masyarakat modern yang rumit tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. Misalkan saja dalam proses penyusunan Undang-undang Pemilu, tidak bisa hanya mengandalkan DPR sebagai penyusun utama, melainkan pula harus melibatkan Komisi Pemilihan Umum, lembaga-lembaga pemantau

kegiatan pemilu, kepresidenan, ataupun kepentingan-kepentingan partai politik, serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Sehingga dalam konteks undang-undang pemilu ini, terdapat sejumlah struktur (aktor) yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri.

4. Integrasi dalam sistem

Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Undang-undang Pemilihan Umum tidak akan diputuskan serta ditindaklanjuti jika tidak ada kerja yang terintegrasi antara DPR, Kepresidenan, KPU, Bawaslu, Partai Politik, dan media massa.¹⁰

Dari Penjelasan Easton dapat diilustrasikan melalui skema konsep sistem politik :



Skema Kerja Sistem Politik Easton¹¹

Menurut skema diatas Easton telah memisahkan sistem politik dengan masyarakat keseluruhan karena bagi Easton sistem politik adalah suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai di tengah masyarakat secara otoritatif. Alokasi nilai hanya dilakukan oleh

¹⁰ Mas'oe'd Mochtar dan Mac Andreas, Perbandingan Sistem Politik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hal 3-26.

¹¹ *Ibid.*

lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang legitimate (otoritatif) di mata warganegara dan konstitusi. Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan (decision) dan tindakan (action) yang disebut kebijakan (policy) guna mengalokasikan nilai. Menurut Easton unit-unit sistem politik adalah tindakan politik (political actions) yaitu kondisi seperti pembuatan UU, pengawasan DPR terhadap Presiden, tuntutan elemen masyarakat terhadap pemerintah, dan sejenisnya. Dalam awal kerjanya, sistem politik memperoleh masukan dari unit input.

Maka dari itu dalam proses pembuatan kebijakan dalam menyetujui adanya keikutsertaan Indonesia dalam AEC 2015 seharusnya pemerintah mengindahkan masukan masyarakat luas dahulu serta menganalisa kondisi SDM Indonesia (input) karena dalam AEC 2015 SDM merupakan partikel yang penting dan menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut (output). Adanya pengaruh lingkungan membuat pemerintah Indonesia tergesa-gesa dalam menanggapi adanya keputusan keikutsertaan Indonesia dalam AEC, lingkungan itu sendiri adalah politik internasional. Namun sekarang yang perlu ditindaklanjuti pemerintah Indonesia adalah membuat kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas SDM menuju AEC 2015, dengan input masyarakat Indonesia sendiri tanpa menghiraukan pengaruh lingkungan luas dengan tujuan output meningkatnya kualitas SDM Indonesia yang kemudian mampu

berkompetisi dengan masyarakat Negara lain dalam AEC 2015, nah dalam proses ini perangkat diferensiasi dalam sistem, presiden selaku kepala Negara tidak bisa hanya mengandalkan DPR saja untuk membuat undang-undang guna meningkatkan kualitas SDM Indonesia, namun presiden juga harus menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga struktur lainnya guna mengetahui input apa yang seharusnya bisa menjadi output yang sempurna guna mengoalkan tujuan utama. Integrasi antar lembaga tersebut sangat dibutuhkan guna mendapatkan hasil kebijakan yang bisa dinikmati masyarakat dan mensejahterakan masyarakat dengan tujuan utama masyarakat yang mampu berkompetisi di AEC 2015.

2. Konsep SWOT

Menurut David Start dan Ingie Hovland Analisis SWOT adalah instrument perencanaan starategis yang klasik. Dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan kesempatan eksternal dan ancaman, instrument perencanaan strategis yang klasik. Dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan juga kesempatan eksternal dan ancaman, instrument ini cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Instrument ini menolong para perencana apa yang bias dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka. Dilihat dari permasalahan ini penulis mencoba menggunakan konsep SWOT untuk menganalisis permasalahan kesiapan SDM Indonesia dalam menghadapi AEC 2015.

SWOT adalah singkatan Strength ialah kekuatan, Weakness ialah kelemahan, Opportunities ialah peluang, Threats ialah ancaman.

Analisa SWOT ini terbagi atas empat komponen dasar adalah :

1. S : *Strength*, yaitu situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini.
2. W : *Weakness*, yaitu situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan organisasi atau program pada saat ini.
3. O : *Opportunity*, yaitu situasi atau kondisi yang merupakan kesempatan diluar organisasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan guna mengembangkan organisasi dimasa yang akan datang.
4. T : *Threat*, yaitu situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mempengaruhi eksistensi organisasi di masa yang akan datang.¹²

¹² daps.bps.go.id/file_artikel/66/Analisis%20SWOT.pdf

Tabel Analisa Konsep SWOT

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Analisa	Keterangan
Strength (Kelebihan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komoditas Ekspor pertanian : Minyak Sawit, Kopi Robusta, Karet, Beras, Kakao, dan Cengkeh. 2. Pertambangan : Timah, Emas, Tembaga, Batubara dan Gas bumi.
Weakness (Kelemahan)	<p>Di bidang SDM Indonesia masih sangat belum siap dalam menghadapi AEC 2015, karena masih rendahnya kemampuan masyarakat disebabkan masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya kemampuan berbahasa internasional (Inggris) dan masih banyaknya pengangguran. Kelemahan lain yang menjadi faktor penunjang kualitas SDM adalah masih kurangnya peran pemerintah dalam menguatkan ekonomi mikro dan pola pikir masyarakat yang belum mau menjadi wirausaha dalam negeri.</p>
Opportunity (Kesempatan)	<p>Produk-produk Indonesia dapat masuk dengan mudah di pasar-pasar ASEAN. Indonesia dapat mengembangkan industri domestik untuk mengekspor produk-produk Indonesia dengan mudah di negara-negara ASEAN lainnya.</p>
Threat (Tantangan/ Ancaman)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kerja dari negara-negara ASEAN bebas memasuki Indonesia yang menyebabkan persaingan dengan tenaga kerja domestik. 2. Arus barang dari Negara-negara ASEAN lainnya bisa membanjiri Indonesia.

Strengths (kekuatan) yang dimiliki oleh Indonesia adalah dibidang pertanian dimana Indonesia dapat menghasilkan beberapa komoditi ekspor unggulan dibidang pertanian seperti, penghasil minyak sawit, karet, beras, kopi robusta, kakao, dan cengkeh yang semua itu diekspor ke Negara-negara di ASEAN. Selain itu pertambangan Indonesia yang lebih baik dari Negara-negara ASEAN lainnya sehingga bisa mengekspor timah, emas, tembaga, batubara dan gas bumi ke Negara-negara ASEAN.

Weakness (Kelemahan) yang dimiliki Indonesia adalah dibidang Sumber Daya Manusia yang belum sangat siap dalam menghadapi kompetisi AEC 2015. Masih rendahnya kemampuan masyarakat Indonesia karena masih banyaknya masyarakat yang berpendidikan rendah, rendahnya kemampuan masyarakat berbahasa Inggris dan masih banyaknya pengangguran yang berpendidikan sarjana. Faktor lain yang mendukung kelemahan disektor SDM adalah kurangnya lapangan kerja yang pemerintah sediakan untuk masyarakat, pola pikir masyarakat yang masih mengandaikan ijazah dan tak mau menjadi wirausahawan membuat Indonesia krisis industri dalam negeri. Belum lagi masyarakat yang berkemampuan tinggi (*High Skilled*) yang memilih untuk berpindah kerja ke Negara lain karena alasan-alasan tertentu. Faktor lain yang mengakibatkan kelemahan disektor SDM adalah ketidakrataan komposisi SDM Indonesia dalam wilayah bagian Indonesia, seperti masyarakat lebih memilih bekerja atau menetap dipulau Jawa dibanding wilayah lain yang infrastrukturnya masih belum berkembang, komposisi ini yang membuat

dalam suatu wilayah mengalami ledakan penduduk dan lapangan kerja di wilayah lain krisis SDM, padahal faktanya Indonesia adalah negara yang berpenduduk terbesar ketika setelah India.

Opportunities (Peluang) yang dimiliki Indonesia adalah produk-produk Indonesia dapat masuk dengan mudah di pasar-pasar ASEAN. Indonesia dapat mengembangkan industri domestik untuk mengekspor produk-produk Indonesia dengan mudah di negara-negara ASEAN lainnya.

Threats (ancaman) untuk Indonesia adalah dengan adanya pasar bebas di ASEAN, membuat tenaga kerja negara-negara ASEAN lainnya dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia tanpa visa yang mengakibatkan ancaman bagi tenaga kerja pribumi yang tak mampu bersaing dengan tenaga kerja negara-negara ASEAN lainnya. Ancaman lain seperti mudahnya produk-produk negara ASEAN lainnya masuk ke Indonesia tidak terkena biaya masuk yang mengancam produk-produk dalam negeri Indonesia yang tidak mampu bersaing dengan produk-produk negara ASEAN lainnya.

3. Konsep Regionalisme

Beberapa pengertian Regional Hubungan internasional terdiri atas berbagai macam interaksi antar aktor-aktor di dalamnya, baik itu aktor negara maupun non-negara. Interaksi yang timbul ini dapat berupa kerjasama ataupun konflik. Kerjasama antar negara dapat mengarah pada suatu fenomena yang disebut 'regionalisme'

Regionalisme adalah seperangkat sikap, kesetiaan, dan ide-ide yang menyatukan pikiran individu dan kolektif dari masyarakat atas apa yang mereka persepsikan sebagai wilayahnya. Di dalam studi Hubungan Internasional, Regionalisme memiliki irisan studi yang sangat erat dengan Studi Kawasan (Area Studies). Bahkan, dalam aplikasi analisis, istilah region (kawasan) dengan regionalisme sering kali tumpah tindih.

Istilah regionalisme berasal dari kata 'regional' ditambah 'isme'. Region dalam perspektif hubungan internasional merupakan unit terkecil dari suatu negara yaitu nation-state. Sedangkan regional merupakan dua atau lebih negara (nation-state) yang letaknya secara geografis berdekatan. Berdasarkan pengertian tersebut maka regionalisme dapat dimaknai secara sederhana sebagai suatu kerjasama regional. Sedangkan menurut Joseph Nye, yang dimaksud dengan region internasional adalah kumpulan sejumlah negara yang dihubungkan atas dasar kondisi geografis dan ketergantungan bersama.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka Nye menyatakan bahwa regionalisme merupakan wilayah yang dibentuk berdasarkan formasi region. Pemikiran Nye ini menunjukkan bahwa regionalisme dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan fisik, seperti letak geografis negara-negara anggotanya.¹³ Hal seperti ini yang mempengaruhi percepatan pasar tunggal asean yang akan digelar pada

¹³ Artikel "Regionalism in Theoretical Perspective" dan "The Regional Dimension in IR Theory" oleh Andrew Hurrell

tahun 2015, adanya persamaan wilayah, budaya, perdagangan, dan saling ketergantungan dapat disatukan untuk tujuan bersama demi adanya persaingan yang fair dengan Negara asia lainnya seperti china dan india. Namun masalah lainnya adalah masih kecilnya presentase perdagangan dilingkungan intra asean yaitu 22,1% semenjak dicanangkan kerangka AFTA 1992 karena adanya hambatan non tariff, perbedaan standar produk dan belum harmonisnya prosedur bea cukai. Kemudian masalah internal Indonesia yang implikasinya pada AEC 2015 yaitu masih lemahnya ekonomi mikro Indonesia dimana perekonomian mikro merupakan kunci utama bagi suatu negara dalam mengukur kualitas SDM nya, seperti Jepang melalui sektor beberapa sektor mampu meningkatkan perekonomian mikronya sebagai contoh sektor pertanian dimana Jepang merupakan penghasil sayur-sayuran berkualitas Internasional dan masyarakatnya mampu menunjukkan pada dunia bahwa jepang memiliki SDM yang sangat berkualitas dengan menghasilkan hasil bumi yang berkualitas dan dapat diekspor ke luar negeri, itu tak bisa jauh dari peran pemerintah dimana pemerintah jepang sangat memperhatikan ekonomi mikro kerakyatan dimana sistem dan informasi sangat dipahami dan tersampaikan oleh masyarakat jepang sehingga perekomian jepang meningkat pesat dan kualitas SDM pun berkualitas yang kemudian membawa Jepang menjadi macan Asia mendampingi Singapura dan Korea Selatan.¹⁴

¹⁴ fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-47494-MBP%20Asia%20Timur-

Maka dari itu AFTA 2015 jika memang harus segera digelar dengan menyamakan kualitas, tarif dan dengan tujuan memperbesar angka perdagangan di lingkungan intra ASEAN dengan mengindahkan aspek-aspek internal disetiap anggota ASEAN khususnya Indonesia yang masih memiliki masalah pada sumber daya manusia.¹⁵ Meskipun dalam pertemuan anggota ASEAN di Bali yang disebut Bali Concord I dan Bali Concord II, yang jelas-jelas Indonesia yang paling semangat dalam persetujuan tersebut tapi harus digaris bawahi tentang kesiapan masyarakat Indonesia sendiri dalam menghadapi AEC.

D. Hypothesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini mengenai “Strategi yang dapat diambil oleh pemerintah RI dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Menuju ASEAN Economic Community 2015” adalah

1. Penguatan kualitas SDM melalui peningkatan Pendidikan
2. Penguatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas Kesehatan
3. Penguatan kualitas SDM melalui peningkatan Perekonomian

Dinamika%20Ekonomi%20dan%20Politik%20Internal%20Jepang%20%20serta%20Politik%20Luar%20Negeri%20Jepang.html

¹⁵ Luhulima C.P.F., Dewi Fortuna Anwar Masyarakat(2008), Asia Tenggara menuju komunitas ASEAN 2015, Pustaka Pelajar, hal 122-123.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode penulisan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library research*) yaitu mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa data yang diambil dari dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan, buku, surat kabar, majalah, internet serta berbagai media lain. Dan sumber-sumber lain yang relevansi yang akan menjadikan penelitian ini menjadi penelitian ilmiah.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk menghindari perluasan dalam fokus pembahasan dan meminimalisir inkonsistensi pokok permasalahan yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini, penulis berinisiatif membatasi pokok-pokok pembahasan dengan dimensi waktu dan upaya-upaya strategi Indonesia dalam meningkatkan kualitas SDM guna menghadapi AEC 2015 yang akan datang.

Penulis memutuskan membatasi waktu yang dilakukan Indonesia meningkatkan kualitas SDM dalam menghadapi AEC dari 2008 sampai 2014. Karena selang waktu tersebut banyak hal yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan kualitas SDM guna menghadapi AEC.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini penulis akan membahas tentang kondisi SDM Indonesia sebelum ASEAN Economic Community

BAB III : Pada bab ini akan dibahas mengenai sejarah ASEAN dan ASEAN Economic Community (AEC).

BAB IV : Pada bab ini akan membahas tentang Usaha pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia guna menghadapi kompetisi pasar bebas ASEAN 2015.

BAB V : Kesimpulan.